

Analisis Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan RSUD R.T Notopuro Sidoarjo

Ayu Kartika Canda Dewi¹, Amrina Yulfajar²

^{1,2}STIE Mahardhika Surabaya, Indonesia

email: ayucandadwi@gmail.com¹, amrinayu@stiemahardhika.ac.id²

Article Info

Article history:

Received : 28 - 04, 2026

Revised : 07 - 05, 2026

Accepted : 28 - 05, 2026

Keywords:

performance report, regional government, regional public hospital, public service, BLUD, accountability.

ABSTRACT

This study aims to analyze the regional government performance report in the management of RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo as a regional public hospital owned by the Sidoarjo Regency Government. The study uses a qualitative descriptive method with a literature study approach and secondary data obtained from performance reports, hospital profiles, scientific journals, official government sources, and relevant literature sources. The results of the study indicate that hospital management has experienced fairly good development through the implementation of the Regional Public Service Agency (BLUD) pattern, improvement of health service facilities, development of digital services, and enhancement of public service quality. However, several obstacles are still found, such as patient queues, limited human resources, and challenges in the effectiveness of health services. The regional government continues to conduct evaluations and supervision of hospital performance in order to improve the quality of services to the community. This study is expected to serve as a reference in developing more effective regional hospital management.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Ayu Kartika Canda Dewi*

STIE Mahardhika Surabaya, Indonesia

Email: ayucandadwi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Rumah sakit umum daerah (RSUD) berfungsi sebagai lembaga penyedia jasa publik yang memegang kedudukan penting dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai entitas yang berada dalam lingkup sektor publik, rumah sakit milik pemerintah daerah wajib mengimplementasikan sistem pengelolaan yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, keterbukaan, serta pertanggungjawaban. Untuk memperkuat pelaksanaan tujuan tersebut, pemerintah mengadopsi mekanisme pengelolaan keuangan melalui pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga rumah sakit memperoleh keleluasaan dalam mengatur sumber daya finansial secara lebih mandiri tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas kepada publik. Penerapan kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan sumber daya secara lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat terwujudnya praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sebagai fasilitas kesehatan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo mengemban tanggung jawab yang besar dalam memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Dengan statusnya sebagai rumah sakit rujukan, lembaga ini dihadapkan pada beragam persoalan, di antaranya peningkatan jumlah pengguna layanan, keterbatasan fasilitas

pendukung beserta infrastruktur, serta ekspektasi masyarakat yang terus meningkat terhadap mutu pelayanan. Dalam pelaksanaan pola BLUD, pihak rumah sakit diwajibkan mengembangkan mekanisme penyusunan anggaran yang berorientasi pada capaian kinerja sehingga proses perencanaan, implementasi, hingga penilaian anggaran dapat berjalan secara terpadu dan berkesinambungan. Walaupun skema BLUD telah menghadirkan keleluasaan dalam pengelolaan aspek keuangan, pelaksanaannya masih memperlihatkan adanya kesenjangan (*gap*) antara target kinerja yang telah dirancang dengan realisasi penggunaan anggaran. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan rumah sakit secara optimal, baik dari sisi efektivitas maupun efisiensi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima evaluasi atas keputusan serta tindakan yang dilakukan. Dalam sektor publik, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan sumber daya publik dan hasil pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam menilai kinerja instansi pemerintah, termasuk rumah sakit daerah.

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sementara itu, akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas sebagai pihak yang berhak mengetahui dan menilai kinerja organisasi publik. Dalam konteks rumah sakit daerah, kedua bentuk akuntabilitas ini sama-sama penting karena rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah sebagai pemberi wewenang, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

Selain itu, Ellwood dalam Mardiasmo menjelaskan bahwa akuntabilitas organisasi sektor publik memiliki empat dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kejujuran dan hukum menekankan kepatuhan terhadap peraturan serta pencegahan penyalahgunaan wewenang. Akuntabilitas proses berkaitan dengan ketepatan prosedur, sistem informasi, dan administrasi yang digunakan. Akuntabilitas program menilai apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Adapun akuntabilitas kebijakan menilai pertanggungjawaban atas keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kepada publik.

Dalam perkembangan terbaru, akuntabilitas organisasi sektor publik semakin dipahami tidak hanya dari laporan formal, tetapi juga dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Pada rumah sakit daerah, hal ini berarti akuntabilitas perlu dilihat dari kualitas pelayanan, kepuasan pasien, keterbukaan informasi, dan kemampuan rumah sakit dalam merespons kebutuhan publik. Dengan demikian, akuntabilitas rumah sakit daerah tidak dapat dinilai hanya dari kelengkapan laporan, melainkan juga dari dampak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2.2. Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu atau organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam organisasi sektor publik, kinerja tidak cukup dinilai dari pencapaian target administratif semata, tetapi juga dari efektivitas, efisiensi, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Pada rumah sakit daerah, kinerja mencerminkan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan pasien.

Dalam konteks rumah sakit BLUD, kinerja juga berkaitan dengan kemampuan mengelola sumber daya, anggaran, dan pelayanan secara optimal. Capaian kinerja yang baik seharusnya ditunjukkan melalui peningkatan mutu layanan, kepuasan masyarakat, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, penilaian kinerja rumah sakit perlu menggabungkan indikator administratif dan indikator pelayanan publik agar hasil analisis lebih menyeluruh.

a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang digunakan pemerintah untuk merencanakan, mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja instansi secara sistematis. SAKIP menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dalam rumah sakit daerah, SAKIP berfungsi sebagai alat untuk menilai konsistensi antara rencana strategis, perjanjian kinerja, realisasi, dan evaluasi hasil.

Melalui SAKIP, rumah sakit dapat menunjukkan bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Karena itu, SAKIP tidak hanya berperan sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai dasar analisis untuk melihat apakah kinerja rumah sakit benar-benar sejalan dengan tujuan pelayanan publik.

Rencana strategis (Renstra) berfungsi sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam praktiknya, Renstra tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga arah kebijakan yang harus diterjemahkan ke dalam target dan indikator kinerja yang jelas. Perjanjian kinerja kemudian menetapkan sasaran dan target yang harus dicapai dalam satu periode tertentu. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Penilaian dalam penelitian ini difokuskan pada kejelasan sasaran strategis, keterukuran indikator kinerja, serta konsistensi antara tujuan organisasi, sasaran, dan target dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, kinerja organisasi dapat diketahui secara objektif melalui capaian yang terukur.

Pengukuran kinerja dianalisis berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja utama dengan cara membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di rumah sakit daerah serta sejauh mana tujuan yang direncanakan tercapai secara optimal. Pelaporan kinerja dianalisis dari aspek kelengkapan, keakuratan, dan konsistensi data yang disajikan dalam laporan kinerja instansi, serta sejauh mana laporan tersebut mampu menggambarkan capaian kinerja, hambatan yang dihadapi, dan upaya perbaikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Evaluasi kinerja dianalisis berdasarkan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap capaian kinerja sebelumnya, termasuk identifikasi kendala dan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, serta melihat konsistensi antara hasil evaluasi dengan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Dengan demikian, analisis SAKIP dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai sistem manajemen kinerja yang menilai konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan hasil kinerja organisasi secara menyeluruh di rumah sakit daerah.

b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas kepada instansi pemerintah dalam mengelola pelayanan, keuangan, dan sumber daya. Dalam rumah sakit daerah, status BLUD memungkinkan pengelolaan yang lebih lincah dibandingkan satuan kerja biasa karena rumah sakit dapat merespons kebutuhan layanan dengan lebih cepat. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus disertai dengan akuntabilitas dan evaluasi kinerja yang ketat.

Penerapan BLUD pada rumah sakit daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, kualitas pelayanan publik, dan kepuasan masyarakat. Meski demikian, status BLUD tidak otomatis menjamin pelayanan yang baik jika tidak dibarengi dengan pengawasan, evaluasi, dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Karena itu, dalam penelitian, BLUD perlu dibahas sebagai instrumen tata kelola yang harus dibuktikan melalui capaian kinerja yang nyata.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif sebagai pendekatan utama dalam proses pengkajian. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, yang mencakup penyusunan rencana strategis, penyepakatan perjanjian kinerja, pelaksanaan pengukuran kinerja, pengelolaan informasi kinerja, penyusunan laporan kinerja, hingga pelaksanaan *review* serta evaluasi terhadap kinerja rumah sakit daerah. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, yaitu berbagai informasi yang telah tersedia dan diperoleh melalui dokumen resmi. Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari laporan kinerja yang diterbitkan oleh RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo beserta berbagai dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, proses analisis dilakukan secara menyeluruh terhadap setiap tahapan, dimulai dari penyusunan perencanaan kinerja, penetapan perjanjian kinerja, pelaksanaan pengukuran kinerja, hingga penyusunan pelaporan serta evaluasi atas capaian kinerja RSUD tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009, rumah sakit dapat didefinisikan sebagai fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Ini berarti rumah sakit memberikan pelayanan yang lengkap, mulai dari diagnosis, pengobatan, hingga pemulihan kesehatan. Pelayanan di rumah sakit ditujukan untuk berbagai kelompok usia dan kondisi medis, dengan didukung oleh tenaga medis profesional dan peralatan medis yang memadai. Salah satunya yaitu RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo yang merupakan salah satu rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kelas A yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit ini menjadi

fasilitas kesehatan rujukan bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo dan wilayah sekitarnya. Letaknya yang strategis di kawasan Kabupaten Sidoarjo memudahkan akses pelayanan kesehatan baik bagi masyarakat perkotaan maupun daerah sekitar. Sebagai rumah sakit daerah, RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo memberikan berbagai jenis pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan rawat jalan (poliklinik spesialis dan eksekutif), rawat inap, instalasi gawat darurat (IGD) 24 Jam, pelayanan laboratorium, pelayanan Radiologi, dan Pelayanan Farmasi. Rumah sakit ini juga terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui pengembangan fasilitas kesehatan, peningkatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pelayanan kesehatan. Adapun Nilai-nilai dasar yang dianut oleh RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo yaitu profesional, integritas, dan beretika.

Makna dari nilai dasar sebagai berikut :

1. Profesional yaitu keyakinan terhadap tatanan dalam memberikan pelayanan yang berlandaskan pada kaidah ilmiah dan kaidah profesi serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, dengan ciri: bertanggung jawab, inovatif, kreatif, efektif, efisien, dan optimis.
2. Integritas yaitu berperilaku sebagai insan yang beriman, jujur, kerja keras, disiplin, berkomitmen, mendahulukan kepentingan organisasi, serta mampu menjaga keseimbangan Emotional Quotion (EQ), Intellectual Quotion (IQ), dan Spiritual Quotion (SQ).
3. Beretika yaitu nilai yang dijunjung tinggi dalam pergaulan dengan klien, antar sesama anggota tim kesehatan, antara petugas dengan pimpinan unit kerja maupun etika dalam menjalankan profesi kesehatan dengan klien berprinsip senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Salah satu etika dalam melayani pasien dan pengunjung adalah sikap 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun).

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka diperlukan visi dan misi yang ditetapkan oleh RSUD R. T. Notopuro Sidoarjo sebagai berikut:

a) Visi

Menjadi Rumah Sakit terakreditasi internasional yang berkelanjutan dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian.

b) Misi

1. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan
2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan yang bermutu dan beretika untuk menunjang pelayanan.
3. Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas dan beretika.

4.1. Laporan kinerja

RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo pada tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerja tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Tahun 2025-2029. Berdasarkan Rencana Strategis RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Tahun 2021-2026 RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo memiliki satu sasaran strategis yaitu Meningkatkan pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas, akuntabel, dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu Status Akreditasi Rumah Sakit, Nilai SAKIP, Nilai SKM, dan Nilai IPP. Sedangkan pada Rencana Strategis RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Tahun 2025-2029 RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo memiliki dua sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas, dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan dengan indikator kinerja Status Akreditasi Rumah Sakit;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Predikat Kinerja Perangkat Daerah (IKP).

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo atas perjanjian kinerja tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Tahun 2021-2026 seluruh indikator telah mencapai target 100%. Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 2 (dua) indikator kinerja utama RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo atas perjanjian kinerja tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Tahun 2025-2029 diperoleh hasil bawah seluruh indikator telah mencapai target 100%.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan laporan kinerja. Capaian ini menunjukkan adanya kepatuhan administratif dan kemampuan rumah sakit dalam memenuhi indikator yang telah dirumuskan. Namun, pencapaian target secara formal tidak selalu identik dengan peningkatan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, keberhasilan tidak hanya diukur dari terpenuhinya angka target, tetapi juga dari pengalaman pasien, kecepatan layanan, kenyamanan, dan pemerataan akses pelayanan.

Capaian 100% pada indikator kinerja perlu dibaca secara hati-hati karena angka tersebut bisa saja mencerminkan keberhasilan pelaporan, bukan sepenuhnya keberhasilan layanan. Misalnya, jika target SAKIP, SKM, atau indikator akreditasi telah tercapai, tetap perlu dilihat apakah di lapangan masih terdapat keluhan tentang antrian panjang, keterbatasan tenaga medis, waktu tunggu layanan, atau beban kerja pegawai yang tinggi. Kondisi seperti ini menunjukkan adanya *gap* antara capaian administratif dan realitas pelayanan publik. Dengan kata lain, akuntabilitas formal belum tentu sejalan dengan akuntabilitas substantif.

Dari sisi BLUD, status fleksibel yang dimiliki rumah sakit seharusnya memberi ruang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan mutu layanan. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut juga menuntut tata kelola yang lebih disiplin agar tidak berhenti pada pencapaian angka kinerja semata. Jika pengelolaan BLUD hanya berorientasi pada pemenuhan indikator dokumen, maka fungsi utama rumah sakit sebagai penyedia layanan publik berisiko kurang optimal. Oleh karena itu, keberhasilan BLUD seharusnya dilihat dari sejauh mana fleksibilitas pengelolaan mampu diterjemahkan menjadi pelayanan yang lebih cepat, lebih adil, dan lebih berkualitas. pembahasan kinerja.

Berikut ini tabel capaian kinerja RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2025 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025 (%)
1	Meningkatkan pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas, akuntabel dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan.	Status Akreditasi Rumah Sakit	Terakreditasi Paripurna	Terakreditasi Paripurna	100%
		Nilai SAKIP	AA (90)	AA (92,29)	102,54%
		Nilai SKM	94,54	96,10	101,65%
		Nilai IPP	4,65	4,842	104,13%

Gambar 1 Capaian Kinerja RSUD R.T Notopuro Sidoarjo Tahun 2025

Sedangkan untuk capaian kinerja RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025 (%)
1	Meningkatnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas, dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan	Status Akreditasi Rumah Sakit	Status Akreditasi Paripurna	Status Akreditasi Paripurna	100%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai Predikat Kinerja Perangkat Daerah (IKP)	81	83,43	103,00%

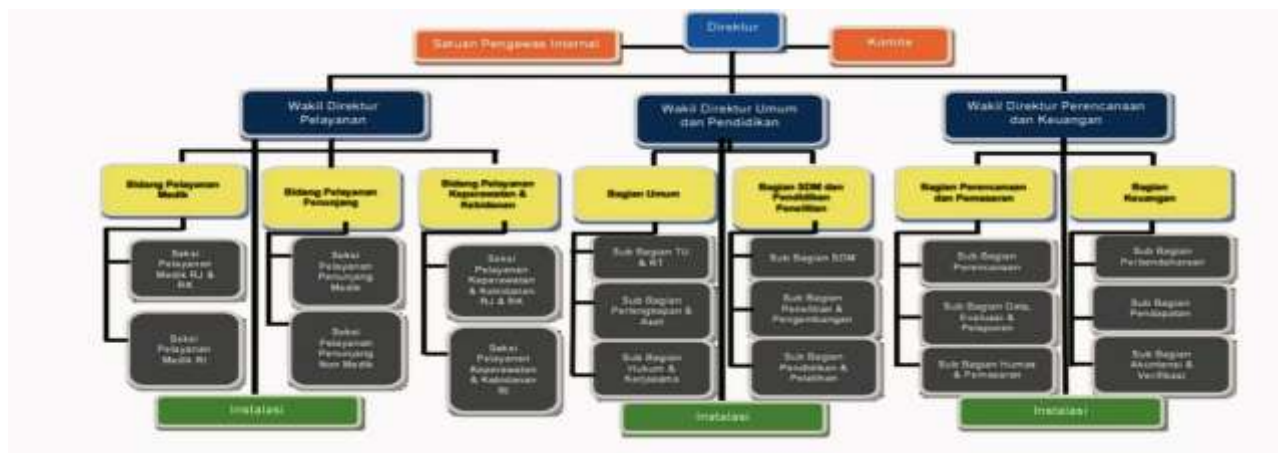
Gambar 2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Berdasarkan data kinerja tersebut, RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo menunjukkan peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan. Nilai SAKIP kategori AA menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik, sedangkan status akreditasi paripurna menunjukkan pemenuhan standar mutu pelayanan rumah sakit. Namun demikian, meningkatnya jumlah kunjungan pasien juga menjadi tantangan tersendiri bagi rumah sakit dalam menjaga efektivitas pelayanan dan kualitas pelayanan publik.

4.2. Akuntabilitas pada Kinerja RSUD R.T Notopuro Sidoarjo

a) Akuntabilitas adalah Sebuah Hubungan

Salah satu aspek dari prinsip akuntabilitas membahas hubungan antara dua pihak di dalam sebuah instansi, baik individu maupun kelompok. Pihak yang memberikan wewenang memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan terhadap tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan oleh pihak lainnya. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas membangun hubungan yang saling bertanggung jawab antara kedua belah pihak.



Gambar 3 Struktur Organisasi RSUD R.T Notopuro Sidoarjo

Pada Gambar 3. Terdapat diagram struktur organisasi dari lini atas hingga lini bawah yang merupakan representasi visual dari hierarki manajemen di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo. Struktur organisasi ini mencerminkan kualitas manajemen organisasi yang baik dengan memperlihatkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara terstruktur kepada setiap pegawai di rumah sakit tersebut. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan sistematis, setiap pegawai dapat menjalankan tugas serta tanggung jawabnya secara efektif dan efisien guna mendukung pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

b) Akuntabilitas Berorientasi pada Hasil

Konsep akuntabilitas berorientasi pada hasil menekankan pentingnya pencapaian kinerja yang dapat diukur. Dalam hal ini, petugas atau aparatur rumah sakit dituntut untuk bekerja secara profesional, jujur, disiplin, adil, dan inovatif dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Pada RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, orientasi terhadap hasil dapat dilihat dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan fasilitas rumah sakit, serta pelayanan yang cepat dan tepat kepada pasien. Penilaian kinerja tidak hanya dilihat dari proses kerja, tetapi juga dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat, seperti kepuasan pasien, efektivitas pelayanan, dan peningkatan mutu kesehatan. Oleh karena itu, orientasi pada hasil menjadi bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas yang efektif serta menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan produktif.

c) Akuntabilitas Membutuhkan Adanya Laporan

RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo menunjukkan komitmennya terhadap prinsip akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan tersebut mencerminkan bagaimana rumah sakit mengelola anggaran dan sumber daya untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Beberapa elemen penting dalam laporan tersebut meliputi :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
Laporan ini menunjukkan perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi pengeluaran selama periode tertentu. Melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas penggunaan anggaran rumah sakit.
- 2) Neraca Keuangan

Neraca keuangan menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas rumah sakit pada periode tertentu. Informasi ini berguna untuk menilai kondisi keuangan serta kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kewajibannya.

- 3) Laporan Arus Kas
Laporan arus kas memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar yang berasal dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan ini membantu dalam memahami pengelolaan keuangan rumah sakit sehari-hari.
- 4) Laporan Operasional/Laba Rugi
Laporan ini menunjukkan pendapatan dan beban rumah sakit selama periode tertentu, seperti pendapatan pelayanan kesehatan dan biaya operasional rumah sakit. Dari laporan ini dapat diketahui kondisi surplus atau defisit operasional rumah sakit.
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan ini memberikan penjelasan rinci mengenai kebijakan akuntansi, rincian aset dan kewajiban, serta informasi penting lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan rumah sakit. Dengan adanya catatan tersebut, laporan keuangan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian temuan penelitian beserta analisis yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa penyelenggaraan RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo secara umum telah memperlihatkan capaian yang positif dalam menunjang pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan keberhasilan institusi mencapai seluruh sasaran indikator performa rumah sakit pada tahun 2025 hingga mencapai 100%, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis periode 2021–2026 maupun 2025–2029. Di samping itu, implementasi sistem pertanggungjawaban kinerja melalui SAKIP, penyusunan dokumen pelaporan capaian, serta pengaturan aspek finansial yang dilaksanakan secara terbuka mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun tata kelola rumah sakit yang memiliki tingkat efektivitas tinggi sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo senantiasa berupaya menyempurnakan mutu layanan dengan melakukan pembaruan sarana dan prasarana kesehatan, memperkuat kapasitas serta kemampuan tenaga kerja, disertai optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan medis. Berbagai prinsip yang meliputi profesionalisme, integritas, serta etika dijadikan sebagai landasan utama dalam setiap penyelenggaraan pelayanan sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara lebih optimal.

Meskipun demikian, proses penyelenggaraannya masih menghadapi sejumlah hambatan yang memerlukan perhatian lebih lanjut, di antaranya lonjakan jumlah pengguna layanan, keterbatasan ketersediaan tenaga kerja, serta berbagai tantangan dalam mempertahankan mutu dan efektivitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan peninjauan, penyempurnaan, dan pembaruan yang dilaksanakan secara berkelanjutan agar kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan semakin meningkat, mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, serta tetap selaras dengan tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2025, August 11). *Mengenal pengertian kinerja dan fungsi penilaiannya dalam perusahaan*. Accurate Online. <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-kinerja/>
- Fattah, N., Damayanti, R. A., & Idris, M. I. U. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *APSSAI Accounting Review*, 3(1), 66–83. <https://doi.org/10.26418/apssai.v3i1.70>
- Halodoc. (2026, February 25). *Rumah sakit adalah tempat penting! Fungsi, jenis, & layanan kesehatan lengkap ada di sini. Cek yuk!* <https://www.halodoc.com/artikel/rumah-sakit-fungsi-jenis-dan-pelayanan-kesehatan>
- KPU Papua Pegunungan. (2025, November 4). *Akuntabilitas adalah: Pengertian, prinsip, dan contohnya*. https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1825_akuntabilitas-adalah-pengertian-prinsip-dan-contohnya
- Marselia, I. T., & Ardhiarisca, O. (2023). Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi kasus pada RSUD Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 18(2), 145–155. <https://doi.org/10.52062/jaked.v18i2.3049>

- Matondang, K. A., Purba, E. E., Zaidan, M. E., & Gaol, D. W. L. (2025). Analisis penerapan akuntansi sektor publik dalam penganggaran daerah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2), 4587–4592. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.44813>
- PPID RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo. (n.d.). *Visi dan misi*. <https://ppid.rsudrtnotopuro.co.id/pages/visi-misi/>
- Rakhmi, A. A. (2018). *Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo* [Skripsi, Universitas Brawijaya]. Repository Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/10574/>
- RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo. (n.d.). *Laporan kinerja*. <https://rsudrtnotopuro.sidoarjokab.go.id/pages/laporan-kinerja>
- Scribd. (n.d.). *Ringkasan laporan keuangan 1*. <https://id.scribd.com/document/892833118/Ringkasan-Laporan-Keuangan-1>
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati. (2021). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–42. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15274>
- Devi, S. M., & Basyar, M. R. (2024). Evaluasi akuntabilitas kinerja (SAKIP) pada instansi pemerintah daerah Kota Surabaya. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(2), 341–352. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1208>
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Martadinata, S. (2024). Akuntansi sektor publik di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, 2(6), 620–624. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i6.106>
- Sriwijayanti, H. (2021). Analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap pengelolaan APBD (Studi persepsi pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Ekobistek*, 89–101. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v7i1.6>